

SETAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN: Pajak Digenjot, PPN Bisa Turun, Coretax Masih Seret

Published on 22 October 2025

Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu penerimaan pajak menjadi fokus utama agenda ekonomi nasional. Dalam rapat terbatas Kabinet Merah Putih di kediamannya, Jalan Kertanegara (16 Oktober 2025), Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus untuk **memperkuat kinerja penerimaan negara, terutama dari sektor pajak di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa**. Kepala Negara meminta setiap kementerian mengambil langkah konkret memperkuat fondasi ekonomi nasional, baik melalui optimalisasi penerimaan pajak maupun penyempurnaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE).

Purbaya, yang baru beberapa pekan menjabat sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani, menghadapi tantangan ganda: **menegakkan target penerimaan pajak di tengah perlambatan ekonomi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat yang mulai tertekan**. Dalam konferensi pers APBN KiTa (14 Oktober 2025), ia mengungkapkan sedang mempelajari **kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% kembali ke 10%**, dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan realisasi penerimaan hingga akhir tahun. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberi ruang konsumsi masyarakat tanpa mengorbankan arah fiskal jangka menengah.

Langkah lain yang ditempuh Purbaya adalah **membuka kanal pengaduan publik “Lapor Pak Purbaya” melalui WhatsApp (0822-4040-6600) untuk menampung keluhan masyarakat terkait pelayanan pajak dan bea cukai**. Kebijakan ini menjadi sinyal pembenahan budaya birokrasi menuju transparansi dan keterbukaan, di tengah upaya pemerintah memperbaiki kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

Namun, agenda reformasi pajak masih dihadapkan pada masalah teknis di lapangan. **Program digitalisasi melalui sistem Coretax berjalan lambat** — baru 2,6 juta wajib pajak yang mengaktifasi akun dari target 14 juta orang pribadi, dan hanya 1,2 juta yang sudah memiliki sertifikat elektronik sebagai tanda tangan digital. Kondisi ini menegaskan bahwa reformasi struktural di DJP masih memerlukan percepatan agar sistem baru dapat berjalan penuh.

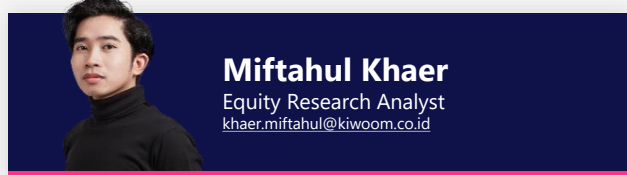
Di sisi lain, **Direktorat Jenderal Pajak mencatat peningkatan signifikan jumlah wajib pajak berpenghasilan tinggi yang membayar PPh dengan tarif 35%, naik sekitar 10% dibanding tahun lalu**. Meski demikian, pemerintah menilai kontribusi kelompok ini belum mencerminkan total kekayaan sesungguhnya, karena banyak penghasilan investasi masih berada di luar skema PPh progresif.

✦ **Dalam konteks penerimaan non-pajak**, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada cukai, **khususnya cukai hasil tembakau** yang selama ini menjadi penopang utama penerimaan negara. Wacana penyesuaian tarif cukai rokok tengah dikaji agar tidak memicu inflasi konsumsi, sementara **opsi cukai baru — seperti untuk minuman berpemanis, makanan ultra-proses, hingga produk berbasis plastik —** kembali muncul sebagai sumber potensial penerimaan tambahan. Namun, kalangan industri meminta agar kebijakan baru tersebut diterapkan secara bertahap mengingat tekanan biaya produksi dan konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

✦ Kebijakan pajak digital juga diarahkan lebih hati-hati. **Menkeu menunda penerapan pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% untuk pedagang online di platform e-commerce hingga pertumbuhan ekonomi menyentuh 6%**. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyambut langkah ini positif, karena memberi ruang adaptasi bagi UMKM digital yang masih tumbuh.

✦ Secara keseluruhan, setahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan **arah fiskal yang menarik: Presiden ingin menggenjot penerimaan negara untuk mendukung pembangunan besar-besaran, sementara Purbaya — yang baru memulai masa jabatannya — berupaya menata ulang kebijakan pajak agar lebih inklusif, digital, dan pro-pertumbuhan**. *Tantangannya kini terletak pada bagaimana mengakselerasi transformasi sistem perpajakan, memperluas basis penerimaan tanpa menekan konsumsi, serta menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.*

Kiwoom Research Team



HEAD OFFICE

Treasury Tower 27th Floor Unit A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28,
Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Tel : (021) 5010 5800
Fax : (021) 5010 5820
Email : cs@kiwoom.co.id

PT Kiwoom Sekuritas Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK)

OTHER DISCLOSURES

All Kiwoom's research reports made available to clients are simultaneously available on our own website <http://www.kiwoom.co.id/>. Not all research content is redistributed, e-mailed or made available to third-party aggregators. For all research reports available on a particular stock, please contact your sales representative. Any data discrepancies in this report could be the result of different calculations and/or adjustments.

DISCLAIMER

This report has been prepared and issued by PT Kiwoom Sekuritas Indonesia. Information has been obtained from sources believed to be reliable but Kiwoom Securities do not warrant its completeness or accuracy. Forward-looking information or statements in this report contain information that is based on forecast of future results, estimates of amounts not yet determinable, assumptions, and therefore involve known and unknown risks and uncertainties which may cause the actual results, performance or achievements of their subject matter to be materially different from current expectations. To the fullest extent allowed by law, PT Kiwoom Sekuritas Indonesia shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses, loss of profits, damages, costs or expenses incurred or suffered by any person or organization arising from reliance on or use of any information contained on this report. The information that we provide should not be construed in any manner whatsoever as, personalized advice. No mention of a particular security in this report constitutes a recommendation to buy, sell or hold that or any security, or that any particular security, portfolio of securities, transaction or investment strategy is suitable for any specific person. This report is being supplied to you solely for your information and may not be reproduced by, further distributed to or published in whole or in part by, any other person.